



► **PEMBANGUNAN NONFISIK**

## Ngupasan Gelar Pra Musrenbang

**GONDOMANAN**—Kelurahan Ngupasan, Kapanewon Gondomanan, Kota Jogja mulai mempersiapkan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) untuk pembangunan di 2024. Salah satu yang menjadi fokus kelurahan ini adalah pembangunan nonfisik seperti pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat.

Lurah Ngupasan Gondomanan Kota Jogja Didik Agus menjelaskan kelurahannya sudah mulai menggelar pra musrenbang dengan menampung aspirasi dari pengurus RT, RW, LPMK dan tokoh masyarakat. Berbagai masukan itu selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dan pembahasan dalam Musrenbang 2023 untuk merencanakan pembangunan di 2024.

“Dimulai dari rembuk dari level kampung dan sudah kami lakukan beberapa waktu lalu. Berbagai masukan ini akan menjadi pertimbangan kami untuk diajukan pada musrenbang mendatang,” katanya, Selasa (6/12).

Ia mengatakan rencana pembangunan untuk kelurahan akan diarahkan pada nonfisik, adapun fisik akan dilakukan oleh Pemkot Jogja dalam hal ini organisasi perangkat daerah

**Pelaksanaan pra musrenbang** di Kelurahan Ngupasan, Gondomanan Kota Jogja.

(OPD) terkait. Adapun bentuk nonfisik tersebut di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat seperti untuk peningkatan ekonomi, sejumlah pelatihan dan pengelolaan sampah. “Kami upayakan ke arah yang nonfisik untuk program kelurahan, kalau yang fisik sudah ditangani oleh OPD terkait,” ujarnya.

Ia mengatakan nonfisik yang paling akan diprioritaskan adalah penanganan sampah karena sebagai kelanjutan dari program yang digelar 2023, sehingga pada 2024 tetap dilanjutkan. Mengingat sampah masih menjadi persoalan di Kota Jogja, terutama jika TPA Piyungan terkendala atau dilakukan penutupan sementara.

“Nanti konsepnya akan dikelola seperti apa dan bagaimana dan penanganannya ini butuh secara berkelanjutan, tahun 2022 sudah jelas sudah berjalan,” katanya.

Salah satu yang butuh penanganan terkait dengan sampah organik agar tidak terbuang di Piyungan maka akan diupayakan untuk diselesaikan di masyarakat sehingga butuh fasilitasi pengelolaan. Sehingga bank sampah butuh dukungan berbagai fasilitas untuk mengelola sampah organik. Jika pengelolaan sampah berbasis RT dan RW maka akan membutuhkan sarana prasarana. Jika hanya mengandalkan swadaya masyarakat tentu memberatkan. “Karena setiap perjalanan pengelolaan ada persoalan terkait fasilitas sehingga dengan dukungan program kelurahan harapannya bisa berjalan dengan lancar,” katanya. *(Sunartono)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005